

ANALISIS PENERAPAN SIMDA DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PADA BPKPD KABUPATEN KERINCI

Ifdhal Adetya Rineldo, S.AP¹, Afrianti, S.E., M.Pd², Ardianto, Sos., M.Si³
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

ifdhal.adetya06@gmail.com

afriyantifebri75@gmail.com

ardiantoarsa@gmail.com

ABSTRACT

This study took the research location at the BPKPD office in Kerinci Regency with the formulation of the problem: How is the Implementation of the Regional Financial Accounting System in Realizing Financial Transparency and Accountability at the Kerinci Regency Financial and Revenue Management Agency. The purpose of this study was to determine the application of the regional financial accounting system in realizing financial transparency and accountability at the Kerinci District Financial and Revenue Management Agency. This study used a qualitative approach where data were obtained by interviewing 5 informants in Kerinci district, which was then analyzed by data triangulation in order to obtain accurate information. The conclusion from this research is that there are problems with the internet network which is inadequate and often blocked from entering the server. The strategy used is through the application using the accrual accounting system and following the regulations of the Minister of Home Affairs and applicable government regulations, for resources in the application of the regional financial accounting system. For the BPKPD, it must be acknowledged that the limitations of ASN are accounting-based. To achieve success in realizing transparency and accountability, it is necessary to take steps, among others, by communicating with Telkom for problematic internet network problems and preparing competent and accounting-based human resources in order to obtain good success. maximum for financial reports at BPKPD Kerinci.

Keywords: Accounting System, Transparency, Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di kantor BPKPD kabupaten kerinci dengan rumusan masalah Bagaimanakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh dengan wawancara di kabupaten kerinci kepada 5 orang informan yang kemudian dilakukan analisa data dengan triangulasi data sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat masalah pada jaringan internet yang kurang memadai dan sering terhambat masuk ke server, Strategi yang digunakan melalui aplikasi dengan menggunakan sistem akuntansi akrual dan mengikuti aturan- aturan permendagri dan peraturan pemerintah yang berlaku, untuk sumber daya dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah untuk di BPKPD memang harus di akui keterbatasan ASN yang berbasis accounting, Untuk mencapai keberhasilan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas maka perlu mengambil langkah antara lain dengan berkomunikasi ke pihak telkom untuk masalah jaringan internet yang bermasalah dan mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berbasis accounting agar diperoleh keberhasilan yang maksimal untuk laporan keuangan pada BPKPD kerinci.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas

I. PENDAHULUAN

Perubahan sistem akuntansi khususnya pada sektor publik terus berkembang, hal yang terjadi pada sektor publik di Indonesia ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara (Inessa Trihani: 2018). Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP). Seiring dengan terbitnya paket Undang Undang Keuangan Negara (UUKN) UU No 17 tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, dan UU No 15 tahun 2004 dan PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (Boris Prayono dan Sutaryo 143 :2007).

Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan dituangkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi sektor publik, dan yang terbaru tinjauan perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan di pusat maupun di daerah ditandai dengan dikeluarkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah Basis akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, dapat tercapai good governance. Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Motivasi peneliti dalam memilih judul penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang Sistem keuangan di daerah sebagai pemberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative, yudikatif, dan masyarakat. Kehadirannya untuk mengatur persoalan keuangan daerah serta di harapkan dapat meminimalisasi kebocoran keuangan atau penyimpangan dalam persoalan anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas Adapun Fenomena yang terjadi di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten kerinci adalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan SIMDA dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada BPKPD Kabupaten Kerinci.”

Tinjauan Pustaka **Persepsi**

Menurut Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja,

melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Oleh karenanya proses persepsi tidak bisa lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.

Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:3) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.

Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

a. Sistem Pencatatan Menurut permendagri Nomor 71 Tahun 2010 pasal 234 ayat 3 menegaskan bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang, oleh karena itu semua transaksi akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan merupakan hasil akhir proses akuntansi. Selanjutnya Permendagri nomor 71 tahun 2010 menetapkan beberapa macam pencatatan yang dapat digunakan, yaitu :

a. Single Entry

Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali, transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan, sedangkan yang mengurangi kas dimasukkan dalam sisi pengeluaran. Double entry Sistem pencatatan Double entry juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

b. Triple Entry

Dalam sistem ini pelaksanaan pencatatan menggunakan double entry tetapi ditambah pencatatan pada buku anggaran jadi pada saat pencatatan double entry dilakukan, PPK SKPD atau bagian keuangan/ SKPD juga melakukan pencatatan transaksi pada buku anggaran, sehingga pencatatan ini berimbang pada sisa anggaran. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

c. Dasar Pengakuan

Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan, yaitu masalah pengakuan. Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi, antara lain :

a) **Basis Kas (Cash Basis)** Cash basis adalah salah satu dasar dalam melakukan pencatatan akuntansi. Pendapatan diakui di catat pada saat kas benar-benar diterima atau adanya penerimaan uang (adanya aliran kas masuk) dan biaya diakui pada saat kas benar-benar dikeluarkan. Basis Kas (Cash Basis) merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas (cash basis) adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain metode Cash Basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Misalnya organisasi melakukan penandatanganan kesepakatan dengan organisasi donor namun uang dana kegiatan belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika uang dana kegiatan telah diterima maka transaksi tersebut baru dicatat jurnal penerimaan. Organisasi membeli secara tunai alat tulis kantor akuntan membuat jurnal pengeluaran.

Basis Kas Modifikasian (Modified Accrual Basis)

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Pada dasarnya basis akrual modifikasi ini adalah basis akrual yang mencatat transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya hanya pada sumber daya yang bersifat lancar (Nordriawan, 2007). Basis ini dalam laporan keuangan memerlukan pengungkapan tambahan atas pos-pos tertentu yang biasanya diakui dalam basis akrual. Pengungkapan ini tergantung dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas pos-pos yang diungkapkan dalam basis

kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo *near-cash* yang diperlihatkan dengan piutang yang akan diterima dan utang yang akan dibayar selama periode tertentu sebagai aset dan kewajiban keuangan (Harun, 2009)

Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis)

Basis mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan. Fokus pengukurannya hanya pada sumber daya yang bersifat lancar (Nordriawan, 2007).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui wawancara sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Analisis Penerapan SIMDA dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada BPKPD Kabupaten Kerinci..

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah dengan *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010: 91), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan atau verifikasi. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif.

Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiono, 2003 : 91). Dalam penelitian kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Bungin, 2003 : 53). Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang bermula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel (Sugiono, 2001 : 61).

Disamping itu pemilihan informan dipilih sesuai dengan prinsip pengambilan informan pada penelitian kualitatif yaitu : Prinsip Kesesuaian, Jumlah informan dan Prinsip kecukupan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur serta buku-buku lainnya yang peneliti anggap perlu dan berhubungan dengan pokok masalah yang peneliti bahas.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan cara :

- a. *Wawancara*
- b. *Studi dokumentasi*
- c. *Triangulasi*

Unit Analisis

Menurut Sugiono (2012 : 02), unit analisis adalah satuan subjek yang akan di analisis, dalam penelitian ini subjeknya adalah di Badan Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Kerinci, atau Bagian di Badan Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang ada kaitannya dengan objek, yaitu mengenai sistem akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Badan Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. SIMPULAN

Dari Jawaban Informan mengenai mengenai apakah penerapan sistem akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik pada Bpkad kabupaten kerinci dapat di tarik kesimpulan „ Untuk penerapan sistem akuntansinya sudah berjalan dengan baik dikarenakan sudah memakai aplikasi simda dan untuk saat ini penerapan sistem akuntansi sedang masa transisi dari aplikasi simda ke aplikasi e-skpd“.

Dari Jawaban Informan mengenai pertanyaan Apa Saja kendala yang di hadapi ketika menerapkan sistem akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat di tarik kesimpulan „ Kendala yang sulit mungkin tidak ada, kendala yang ditemui untuk saat ini pada jaringan internet yang kurang memadai dan kondisi geografis letak kantor saat yang kita ketahui, dikarenakan jaringan internet kurang memadai maka kita sudah untuk mengolah atau membuat data untuk masuk ke server aplikasi dan juga di kantor yang sekarang sering terjadi mati lampu „“ .

Dari Jawaban Informan mengenai pertanyaan Bagaimanakah strategi penerapan sistem akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat di tarik kesimpulan „ Strategi yang digunakan memakai aplikasi simda dan e-skpd dengan menggunakan aplikasi aturan- aturan pemerintah dan permendagri yang berlaku“.

Dari Jawaban Informan mengenai pertanyaan Apa saja kendala dalam penerapan sistem akuntansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada kantor badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dan bagaimana bentuk upaya dalam menanganinya dapat di tarik kesimpulan „ Kendalanya untuk penerapan sistem akuntansi terdapat pada sumber daya manusianya dan jaringan internet yang kurang memadai, dan terkadang juga pada data tidak sinkron antara bendahara dan pihak akuntansinya, upaya menanganinya setiap bulan pasti ada rapat di kantor bupati untuk membahas kendala- kendala yang ditemui, dan untuk masalah jaringan internet kami masih konfirmasi ke pihak Telkom mengenai geografis bukit tengah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan jurnal ini dan LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Adrian Sutedi, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Astuti, 2014 „“ Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah kota Makasar””.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaki. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Cetakan Kesembilan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hanggara, Agie.2019 *Pengantar Akuntansi*. Jakad Publishing. Surabaya
- Miles dan Huberman.1992. Analisis Data Kualitatif Buku sumber tentang Metode-metode baru.
- Edah Jubaedah, Nugraha Lili, Haris Fauzan. (2008) *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung
- Lestari, Kurnia Cahya dan Arni Muarifah Amri. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi.2012. *Akuntansi Biaya*, Edisi lima. Universitas Gajah Mada
- Norman K Denkin. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif (online),(<http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 17 November 2018).
- Pebi Julianto. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Keterampilan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Mtsn Model Sungai Penuh*. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: “*Transparency and Accountability in Public Financial Administration*”. UN DESA.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bandung*: Alfabeta.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bandung*: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuwono, Sony, et al. 2008. *APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.